



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI KOTA BUKITTINGGI**

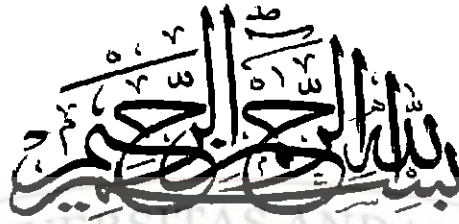
**SKRIPSI**



**M.HUSNI THAMRIN  
06151031**

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2012**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang telah membukakan hati dan pikiran serta memberikan kekuatan dan kesabaran kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas.

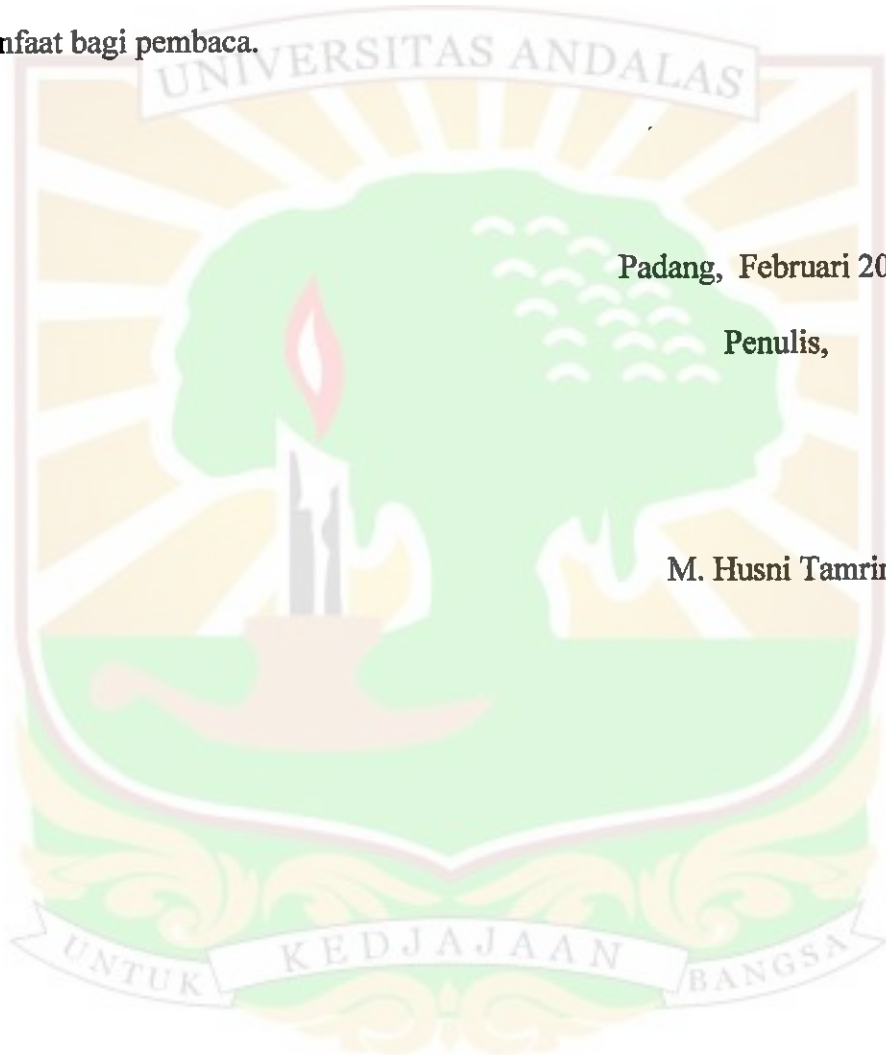
Selama penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya terutama kepada :

1. Ayahanda H. Tamrin Kamal dan Ibunda Diyanati, saudara – saudaraku tersayang, Isnando dan Akhyas beserta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dorongan moril, spiritual dan materil sehingga penulis tetap semangat dalam melangkah.
2. Bapak Drs. H. Masrizal, M.Soc.Sc selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis melalui diskusi, masukan dan arahan serta kebaikan-kebaikan Bapak selama proses penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Drs. Zulkarnaini Ras, M.Si dan Bapak Fery Andrianus, SE.M.Si selaku pembahas skripsi yang telah banyak memberikan saran, pendapat, serta dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr.H. Syafrudin Karimi, SE, MA, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
5. Bapak Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas.
6. Bapak Febriandi Prima Putra, SE, M.Si, Kepala Program Studi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas
7. Ibu Latifah Hanum SE. MS, selaku dosen pembimbing akademik penulis.
8. Segenap staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis melaksanakan perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
9. Staf Biro dan *Reading Room* Jurusan Ilmu Ekonomi, Uni Nel, Ibu Syam, Ibu Nini, Bapak Suryadi serta staf lainnya yang telah memberikan kemudahan selama penulis belajar dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman penulis, seluruh teman-teman Jalan Hamka 114, LPMP UNP, JIE 06 dan juga seluruh keluarga besar Fakultas Ekonomi Umumnya dan khususnya keluarga besar jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah banyak membantu hingga selesainya skripsi ini yang tidak bias disebutkan satu persatu.

Semoga semua bimbingan dan bantuan yang telah diberikan pada penulis mendapat balasan yan setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.



Padang, Februari 2012

Penulis,

M. Husni Tamrin

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iv

DAFTAR TABEL.....vii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Perumusan Masalah ..... 4

1.3 Tujuan Penelitian ..... 4

1.4 Hipotesa ..... 4

1.5 Ruang Lingkup Penelitian ..... 5

1.6 Sistematika Penulisan..... 5

### BAB II KERANGKA TEORI

2.1 Landasan Teori..... 7

2.1.1 Pengertian Pajak..... 7

2.1.2 Fungsi Pajak..... 8

2.1.3 Klasifikasi dan Macam Pajak ..... 9

2.1.4 Pajak Restoran..... 14

2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto..... 16

2.1.6 Penduduk..... 18

2.1.7 Pariwisata.....	19
2.2 Tinjauan Literatur.....	22

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Dan Sumber Data .....	27
3.2 Pembentukan Model.....	27
3.3 Definisi Operasional Variabel .....	28
3.4 Metode Pengolahan Dan Analisis Data .....	30
3.4.1 Metode Kualitatif .....	30
3.4.2 Metode Kuantitatif .....	30
3.5 Uji Hipotesis .....	31

### **BAB IV GAMBARAN UMUM**

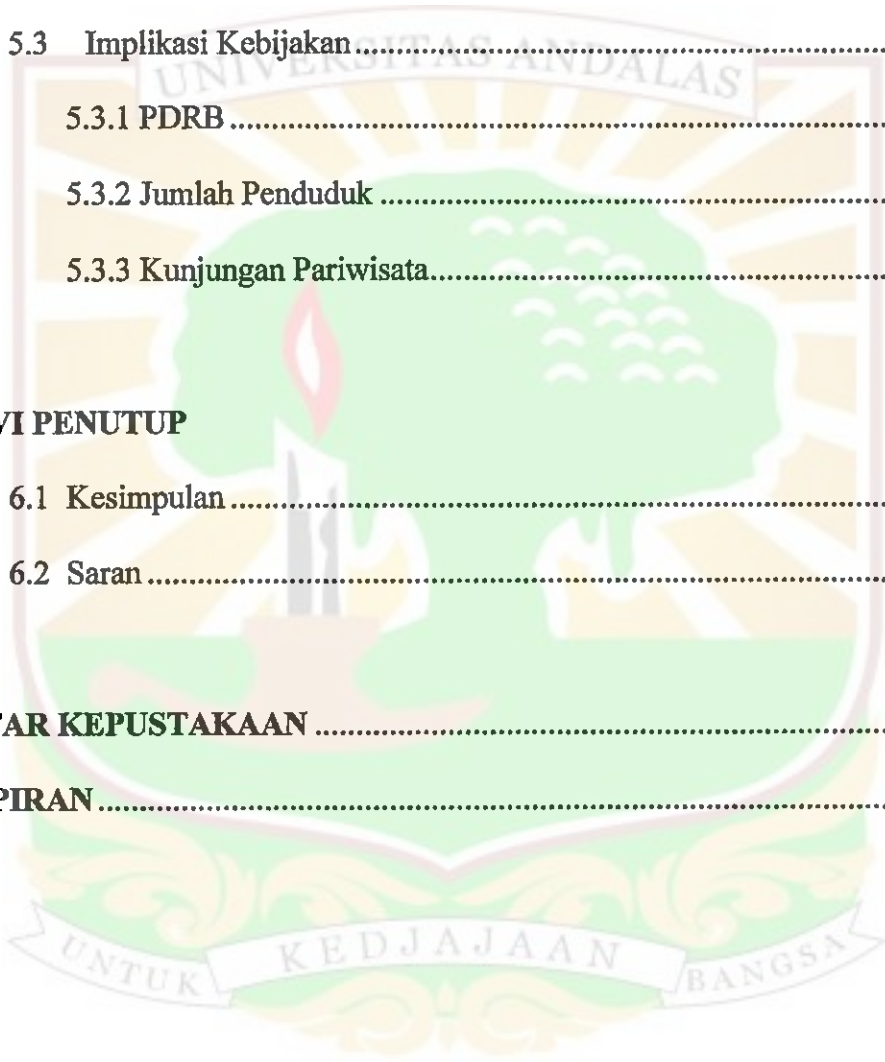
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	35
4.1.1 Keadaan Geografis .....	35
4.1.2 Penduduk dan Luas Wilayah .....	35
4.2 Analisis Data.....	36
4.2.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran di Bukittinggi .....	36
4.2.2 Perkembangan PDRB Kota Bukittinggi.....	40
4.2.3 Kependudukan Kota Bukittinggi .....	43
4.2.4 Perkembangan Kunjungan Wisata di Kota Bukittinggi .....	46

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

5.1 Penemuan Empiris .....	53
----------------------------	----



5.2	Pengujian Hipotesis .....	53
5.2.1	Analisis Koefisien Determinasi .....	53
5.2.2	Uji Simultan .....	54
5.2.3	Analisis Koefisien Regresi .....	55
5.2.4	Uji Parsial (T-test).....	57
5.3	Implikasi Kebijakan .....	59
5.3.1	PDRB .....	60
5.3.2	Jumlah Penduduk .....	60
5.3.3	Kunjungan Pariwisata.....	60
 <b>BAB VI PENUTUP</b>		
6.1	Kesimpulan .....	62
6.2	Saran .....	63
 <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>		<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>66</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1 Luas Wilayah, Rumah Tangga, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2010.....</b>	<b>36</b>
<b>Tabel 4.2 Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran Kota Bukittinggi Tahun 2001-2010 (Rupiah).....</b>	<b>38</b>
<b>Tabel 4.3 Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bukittinggi 2001-2010 (Rupiah).....</b>	<b>39</b>
<b>Tabel 4.4 Jumlah dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Bukittinggi Tahun 2001-2010 (JutaRupiah).....</b>	<b>41</b>
<b>Tabel 4.5 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap Total PDRB di Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2001-2010 (Dalam Persen).....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 4.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2001-2010 (Dalam Jiwa/Orang).....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 4.7 Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Bukittinggi Tahun 2010 (Dalam Jiwa/Orang).....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 4.8 Jumlah Wisatawan yang Berkunjung di Kota Bukittinggi Tahun 2001-2010 (Dalam Jiwa/Orang).....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel 4.9 Jumlah Wisatawan Domestik dan Asing Yang Berkunjung di Kota Bukittinggi Tahun 2001-2010 (Dalam Jiwa/Orang).....</b>	<b>51</b>



21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia secara resmi telah menyatakan pelaksanaan otonomi daerah pada tanggal 1 Januari tahun 2001. Pemberian otonomi kepada setiap daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintah terutama dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan terhadap masyarakat. Menurut (Davey, 1988) dan (Devas, 1998) pemberian otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada prinsipnya untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah.

Untuk pembangunan dibutuhkan dana yang cukup besar. Hal ini juga sebagai penentu sukses atau tidaknya suatu daerah dalam melaksanakan otonomi, dan setiap daerah diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Disamping itu jauh sebelumnya Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 juga memberikan peluang yang cukup besar untuk menggali dan mengelola penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara optimal. Dari kedua undang-undang tersebut, daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan menggunakan prinsip kemandirian dalam menjalankan proses pembangunannya.

Kemudian di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 juga diatur tentang pengaturan keuangan pemerintah daerah secara eksplisit, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu;
  - a. Hasil pajak daerah
  - b. Hasil retribusi daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang syah
2. Dana perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang syah

Menurut (Jhingan, 2008) pajak adalah salah satu instrumen penting dan paling efektif dalam kebijakan fiskal dari sisi penerimaan (*revenue*) dan merupakan sumber penerimaan yang cukup besar. Dan dengan diberlakukannya otonomi daerah, sesuai wewenang untuk menggali pendapatannya, pemerintah daerah menggunakan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan yang lazim dikenal dengan sebutan pajak daerah.

Sehubungan dengan itu, pemerintah kota Bukittinggi di era otonomi daerah telah berupaya untuk menggali dan mengelola berbagai macam sumber penerimaan Pajak Daerah sebagai salah satu yang memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan penerimaan PAD di Kota Bukittinggi. Dalam struktur Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi, penerimaan atas pajak daerah ini merupakan alternatif utama dan sangat potensial untuk membantu mengatasi keterbatasan dana pembangunan disamping sumber-sumber dana lainnya. Hal ini terbukti pada perkembangan pajak daerah kota Bukittinggi dari beberapa tahun terakhir dari tahun 2001 sampai dengan 2010 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2006 mengalami pertumbuhan yang paling

tinggi yaitu 26,17 persen dengan kontribusi terhadap PAD sebesar 29,34 persen, sedangkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah yang terendah terjadi pada tahun 2007 sebesar 1,52 persen namun kontribusi pajak daerah masih cukup tinggi terhadap PAD yaitu 27,01 persen.

Salah satu jenis pajak daerah yang cukup besar memberikan sumbangan terhadap total penerimaan pajak daerah di Kota Bukittinggi adalah pajak restoran. Sejalan dengan itu, perkembangan penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi dalam kurun waktu yang sama juga mengalami kenaikan, dimana pertumbuhan secara rata-rata adalah 16,11 persen, sementara pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 30,78 persen, sedangkan pertumbuhan terendah pada tahun 2004 sebesar 10,61.

Disamping laju pertumbuhan rata-rata penerimaan Pajak Restoran yang cukup tinggi tersebut, juga mempunyai kontribusi terhadap pajak daerah yang diperkirakan relative tinggi. Kontribusi rata-rata setiap tahunnya adalah sebesar 20,71 persen. Dimana kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 23,27 persen, sedangkan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah yang terendah adalah pada tahun 2003 sebesar 16,53 persen.

Terjadinya peningkatan pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain PDRB, Jumlah Penduduk, Kebijakan Pemerintah, Tarif Pajak, Jumlah Kunjungan Wisatawan, dan lain-lain. Dalam penelitian ini hanya akan dikaji dan dianalisis tiga faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi penerimaan Pajak Restoran. Adapun factor tersebut yaitu PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kunjungan Wisatawan. Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi Penerimaan Pajak Restoran di kota Bukittinggi.



Berdasarkan hal diatas, maka penulis ingin melakukan pengujian untuk mengetahui faktor yang dominan dalam menentukan penerimaan Pajak Restoran ini dalam bentuk rancangan skripsi dengan judul :

**“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bukittinggi”**

**1.2 Perumusan Masalah:**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Restoran di Kota Bukittinggi selama periode 2001-2010
2. Bagaimana pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap penerimaan Pajak Restoran di Kota Bukittinggi.

**1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan penerimaan Pajak Restoran di Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap penerimaan Pajak Restoran di Kota Bukittinggi.

**1.4 Hipotesa**

Hipotesa diuji pada analisis atau variabel-variabel independen yang diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Restoran yaitu PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Bukittinggi.

## 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penulisan ini makin terarah maka penulis memberikan batasan-batasan terhadap variabel-variabel yang digunakan yaitu:

1. Periode analisis dari penelitian ini adalah penerimaan Pajak Restoran di Kota Bukittinggi tahun 2001-2010.
2. Variabel yang diteliti difokuskan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pajak Restoran di Kota Bukittinggi.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam studi ini adalah sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan.

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesis, ruang lingkup, serta sistematika pembahasan.

**BAB II** : Kerangka Teori

Bab ini membahas tentang kerangka teori yang digunakan dalam pembahasan, serta penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan literatur dalam peninjauan ini.

**BAB III** : Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang metode analisis data dan sumber data yang digunakan

**BAB IV** : Gambaran Umum

Berisi gambaran umum daerah penelitian dan melihat aspek-aspek data yang digunakan.



**BAB V : Hasil Dan Pembahasan**

Berisi hasil penelitian dan pembahasan serta implikasi kebijakan dari penelitian yang dilakukan.

**BAB VI : Penutup**

Bab ini menguraikan kesimpulan yang dapat diambil terhadap analisa yang telah dilakukan serta saran-saran yang merupakan masukan baik bagi industri maupun pemerintah.



## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Ada beberapa defenisi Pajak yang dikemukakan oleh beberapa orang ahli, menurut S. Munawir (1992) Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik saving yang merupakan hal utama untuk mebiyai publik invesment. Selanjutnya menurut Soediyono (1981) Pajak dimaksudkan sebagai uang atau daya beli yang diserahkan oleh masyarakat kepada pemerintah dimana terhadap penyerahannya tidak diberikan balas jasa secara langsung. Sedangkan Guritno Mangkoesobroto (1995) menambahkan bahwa Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada dimana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan dari penggunaannya.

Beragam pengertian pajak dari para ahli, kemudian disarikan oleh Waluyo dalam Liliyana (2010), adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Dari beberapa defenisi di atas dapat dikemukakan bahwa Pajak adalah suatu pungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah untuk berbagai tujuan, misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengatur perekonomian dan dapat juga dipakai untuk mengatur konsumsi masyarakat. Namun dengan demikian masyarakat yang dikenakan pajak tidak dapat secara langsung menikmati penggunaannya yang dilakukan pemerintah. Dalam pemungutannya, pajak yang dipungut terhadap masyarakat itu telah diatur ketetapan-ketetapannya dalam Undang-Undang.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut Waluyo (2010) secara umum, pajak memiliki dua fungsi yaitu:

#### **1. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan dan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

#### **2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: yaitu dikenakanya pajak lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula dengan barang mewah.

Sementara menurut Hillman (2003) peran pajak dalam membiayai pengeluaran publik menjadi penting ketika berhadapan dengan barang publik murni yang tidak memberikan keuntungan bagi pihak yang menyelenggarakannya. Disaat itulah pemerintah hadir dengan melakukan pembiayaan demi ketersediaan pelayanan publik tersebut. Hal ini diterapkan diseluruh level pemerintahan pusat, propinsi dan kota/ kabupaten dimana pajak digunakan untuk membiayai pelayanan publik, seperti jalan raya, sekolah, kepentingan pertahanan negara, memainkan peran sebagai *automatic stabilizer* dalam perekonomian, sampai digunakan untuk menginternalisasi dampak eksternalitas negative dari mekanisme pasar.

### **2.1.3 Klasifikasi dan Macam Pajak**

Untuk membedakan macam-macam pajak, maka pajak dibagi atas:

1. Menurut golongannya dibagi 2 yaitu :

a. Pajak Langsung

Dibedakan menjadi dua pengertian yaitu pengertian Administratif dan ekonomis. Pajak Langsung Administratif adalah pajak yang dipungut secara periodik dalam waktu tertentu menurut ketentuan pajak dengan ciri-ciri mempunyai Surat Pemberitahuan Pajak (SPJ), dipungut berkali-kali. Sedangkan Pajak Langsung Ekonomis adalah pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada pihak orang lain atau pajak yang harus dipikul sendiri.

b. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang dapat dilimpahkan (digeserkan) kepada pihak lain, misalnya Pajak Hotel Dan Restoran. Konsumen pihak ke III menjadi tujuan pajak,



sedangkan pihak ke II adalah pemilik rumah makan dan pemilik penginapan atau wakilnya.

2. Menurut sifatnya maka pajak dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak subyektif adalah pajak yang dipungut dengan memperhatikan keadaan wajib pajak dengan maksud keadaan wajib pajak berpengaruh terhadap besar kecilnya jumlah pajak yang dibayar. Daya pikul wajib pajak dapat diukur dengan memperhatikan berbagai keadaan wajib pajak (kawin atau tidak kawin) susunan keluarga dan tanggung jawab lainnya.

b. Pajak Obyektif

Pajak obyektif adalah pajak dimana pemungutannya berpangkal pada keadaan obyektifnya. Pajak ini dipungut karena keadaan, perbuatan ataupun kejadian yang dilakukan atau terjadi didalam wilayah negara dengan tidak memindahkan sifat subyektifnya sebagai contoh cukai rokok. Siapa saja yang merokok akan dikenakan bea cukai rokok.

3. Menurut wewenang pungutan maka pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Pajak Negara atau Pajak Pusat

Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraan pemungutannya didaerah atau dilakukan oleh kantor inspeksi pajak setempat (sekarang dinamakan kantor pelayanan pajak) dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara/ pemerintahan. Pada umumnya pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

1. Yang dikelola Direktorat Jendral Pajak :

- Pajak Penghasilan
- Pajak Bumi dan Bangunan
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Pajak Pertambahan Nilai atas Barang-barang dan Jasa
- Bea materai
- Bea lelang

2. Yang dikelola oleh Direktorat Jendral Moneter :

- Pajak Minyak Bumi

3. Pajak yang dikelola oleh Direktorat Bea dan Cukai :

- Bea masuk dan bea keluar
- Pajak pertumbuhan nilai dan Pajak Penjualan barang mewah atas impor barang kena pajak.

b. Pajak Daerah

Berdasarkan pendapat Davey, K.J (1988) defenisi pajak daerah adalah:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan, dibagi-bagikan atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah pusat.



Adapun menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2001) menambahkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang memegang otonomi wilayah. Hasil pajak sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah yang bersangkutan, baik itu daerah tingkat kabupaten ataupun kota maupun di daerah tingkat provinsi dimana pemerintah tidak memberikan jasa timbal balik atau kontraprestasi terhadap para pembayar pajak.

Selain itu pemerintah kota/kabupaten dapat menetapkan jenis pajak daerah yang lainnya, selama memenuhi kriteria sebagai berikut (UU No. 28 Tahun 2009, pasal 2 Ayat 4):

1. Bersifat pajak dan bukan Retribusi
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kota/kabupaten yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten kota/kabupaten yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Potensinya memadai.
5. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
6. Memperhatikan dampak ekonomi yang negatif.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Didalam Undang-Undang No 28 tahun 2009, pajak daerah dapat dibedakan menjadi:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- Pajak Kendaraan Bermotor.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Air Permukaan.
- Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- Pajak Hotel.
- Pajak Restoran.
- Pajak Hiburan.
- Pajak Reklame.
- Pajak Penerangan Jalan.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Pajak Parkir.
- Pajak Air Tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet.
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Disamping pajak kendaraan bermotor, pajak tontonan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak yang lainnya, Pajak hotel dan Restoran ternyata juga memberikan sumbangsih yang besar dalam penerimaan keuangan

pemerintahan daerah khususnya PAD melalui pajak yang diperoleh daerah tersebut, yang dikemukakan oleh Devas (1989).

#### **2.1.4 Pajak Restoran**

Sebelumnya telah dijelaskan tentang pengertian Pajak Restoran di dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, dimana Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering. Selanjutnya pada PP RI No. 65 tahun 2001 juga telah diterangkan tentang Pajak Daerah termasuk pajak restoran, namun di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 telah disempurnakan terhadap artian sebelumnya yaitu, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 juga dijelaskan, objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pelayanan yang disediakan oleh restoran nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak

restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah dengan dasar pengenaan pajak. Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Dalam Liliyana (2010) pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen ini, bebannya berada pada konsumen. Dalam hal ini, pemilik atau pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut.

Dengan demikian, keberadaan pajak restoran tentunya tidak mengurangi keuntungan para pengusaha sehingga tidak menimbulkan hilangnya insentif untuk berusaha di sektor tersebut. Sementara dari sisi penunjang, adanya beban akibat pajak restoran tersebut cukup adil mengingat pengunjung restoran cenderung berasal dari golongan kaya. Seperti diutarakan Devas (1989) dalam Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, pajak restoran (yang pada awalnya merupakan Pajak Pembangunan I) tidak memiliki masalah dari sisi efisiensi ekonomi dan pajak ini dianggap cukup adil. Karena golongan kaya cenderung membelanjakan bagian yang lebih besar dari pendapatannya untuk restoran dari pada kelompok miskin.

Ini juga sejalan dengan peran pajak dalam kaitannya membatasi konsumsi sehingga pemerintah dapat mentransfer sumber dari konsumsi ke jalur investasi. Sementara dari sisi ketepatan sebagai pajak daerah, menurut Devas (1989), pajak



restoran sangat cocok sebagai sumber penerimaan daerah. Karena objek pajak jelas tempatnya dan tempat memungut sama dengan tempat beban pajak.

### **2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto**

Untuk melihat perkembangan pembangunan ekonomi pada suatu daerah dilihat dari pertumbuhan PDRB yang sering disebut pertumbuhan ekonomi daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga yang berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, dan dapat digunakan sebagai perencanaan pengambilan keputusan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bidang penyelidikan yang sudah lama dibahas oleh ahli-ahli ekonomi. Buku Adam Smith yang terkenal, yaitu *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth Nations* atau dengan ringkas, *The Wealth of Nations*, pada hakikatnya adalah suatu analisis mengenai sebab-sebab dari berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan itu. Inti ajaran smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya terbaik untuk dilakukan.

Menurut Arsyad (1999) terdapat perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pakar ekonomi seperti kaum merkantilis, klasik sampai Keynes membedakan pengertian tersebut yaitu: (a) peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertumbuhan PDRB pada suatu tahun tertentu dikurangi dengan tingkat pertumbuhan penduduk (b) perkembangan PDRB yang terjadi pada suatu daerah diikuti oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya (transformasi ekonomi). Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan tujuan dari pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai alat ukur bagi keberhasilan pembangunan.

Menurut Mudrajad (2004), juga menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Saat ini umumnya PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral / lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

Bukittinggi merupakan salah satu kota wisata yang ada di Sumatera Barat. Dengan predikat tersebut akan banyak orang yang akan berkunjung ke kota Bukittinggi. Adanya restoran di kota Bukittinggi akan menambah kenaikan sektor lapangan usaha khususnya sektor perdagangan, hotel dan restoran di Bukittinggi yang merupakan kontribusi dari PDRB. Hal ini dikarenakan restoran mempunyai



pajak yang dipungut dari konsumen yang menggunakan jasa pelayanan restoran. Pajak yang didapat dari restoran tersebut besarnya ditentukan oleh Perda yang berlaku pada pemerintahan daerah Bukittinggi itu sendiri.

### **2.1.6 Penduduk**

Penduduk disamping sebagai factor produksi juga membutuhkan konsumsi terhadap barang dan jasa. Salah satu kebutuhan konsumsi yang mendasar oleh penduduk adalah kebutuhan makan. Kebutuhan makanan tidak hanya disediakan pada rumah tangga, individu maupun masyarakat. Tetapi untuk daerah perkotaan kebutuhan makanan tersebut sangat banyak disediakan oleh restoran. Oleh karena itu menurut Devas (1998) dan Liliyana (2010) apabila jumlah penduduk meningkat maka jumlah kebutuhan makanan yang disediakan oleh restoran juga akan mengalami peningkatan. Hal ini secara sekaligus sudah tentu akan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di daerah tersebut.

Termasuk untuk daerah kota Bukittinggi dimana jumlah penduduk daerah tersebut cukuplah banyak. Seiring dengan itu maka penerimaan pajak restoran di Bukittinggi juga akan mengalami peningkatan, karena jumlah penduduk yang cukup banyak tersebut menggunakan jasa pelayanan restoran untuk memenuhi kebutuhan makan. Beban yang dikenakan kepada konsumen (penduduk) terhadap konsumsinya pada pelayanan restoran tersebutlah pajak restoran didapatkan.

Menurut Mill (1921) dalam Ananta (1990) peningkatan Jumlah penduduk dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. *Maximum Population*, dimana jumlah penduduk terus bertambah sampai pada tingkat maksimum sebatas lingkungan masih mendukungnya.

2. *Minimum Population*, kondisi ketika lingkungan tidak lagi mendukung menyebabkan pertumbuhan spesies akan terhambat dengan sendirinya.
3. *Optimum Population*, dengan perkembangan teknologi dalam menggandakan sumberdaya alam dan mengontrol mortalitas dan fertilitas maka manusia sebenarnya dapat mengendalikan jumlah populasi. Jumlah penduduk optimal yaitu jumlah penduduk yang menghasilkan produksi per kapita yang tinggi. Jumlah tersebut optimal dalam arti tidak ada perubahan baik dalam jumlah maupun mutu sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui dan tersedianya modal fisik.

#### **2.1.7 Pariwisata**

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam penerimaan kas negara pada umumnya dan daerah pada khususnya. Kontribusi sektor pariwisata merupakan iuran seseorang atau badan yang menjalankan kegiatan usaha pariwisata yang diserahkan pada badan atau perkumpulan tertentu.

Pariwisata dapat diartikan perjalanan penuh mulai dari berangkat dari suatu tempat ke satu atau berbagai tempat lain dan singgah kemudian kembali ke tempat semula. Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan (Bab IV pasal 4) disebutkan bahwa objek dan daya tarik wisata terdiri dari atas:

4. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora fauna.
5. Objek dan daya tarik wisata hasil karya ciptaan manusia berupa museum, peninggalan sejarah, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Sedangkan menurut Mudrajat (2001) menyatakan bahwa atraksi wisata dikelompokkan menjadi dua, yaitu atraksi sumber daya alam dan atraksi sumber daya manusia.

1. Atraksi wisata alam adalah setiap ekosistem dan segala isinya. Sumber daya alam fisik dan hayati merupakan atraksi wisata yang dapat dikembangkan untuk objek wisata alam.
2. Atraksi buatan manusia meliputi atraksi budaya (agama, budaya modern, museum, galeri seni, situs arkeologi, bangunan) tradisi (kepercayaan, animasi budaya, festival) dan peristiwa olah raga (olimpiade, piala dunia, turnamen).

Pembangunan sektor kepariwisataan menurut Spillane (1987) akan terkait dengan aspek sosial budaya, politik, dan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 disebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan bekerja serta mendorong pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka kemudahan untuk memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata.

Menurut Salah (2003) pariwisata sebagai gejala terbentuk dalam beberapa kategori seperti berikut:

1. Menurut jumlah orang yang bepergian, yaitu pariwisata individu (pariwisata perseorangan atau satu keluarga yang bepergian) dan pariwisata rombongan

yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diorganisasi dengan baik (pariwisata kolektif)

2. Menurut maksud bepergian, dibedakan atas: pariwisata rekreasi atau santai, pariwisata budaya, pariwisata pulih sehat, pariwisata sport dan pariwisata temu wicara.
3. Menurut alat transportasi, yaitu pariwisata darat (bis, mobil pribadi, kereta api, pariwisata tirta (laut, danau, sungai), pariwisata dirgantara.
4. Menurut letak geografis, yaitu pariwisata domestik nasional (menunjukkan arus wisata yang dilakukan oleh warga dan penduduk asing yang bertugas di sana dan terbatas pada suatu negara tertentu/penduduk setempatnya), pariwisata regional (kepergian wisatawan terbatas pada beberapa negara yang membentuk suatu kawasan pariwisata), dan pariwisata internasional (meliputi gerak wisatawan dari satu negara ke negara lain di dunia).
5. Menurut umur, yang membedakan kebutuhan dan kebiasaan yaitu terdiri dari pariwisata remaja dan pariwisata dewasa.
6. Menurut jenis kelamin, yaitu pariwisata pria dan pariwisata wanita.
7. Menurut tingkat harga dan tingkat sosial, yaitu pariwisata taraf lux, pariwisata taraf menengah, dan pariwisata taraf jelata.

Dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan kunjungan atau kedatangan orang pada suatu daerah yang dianggap tempat untuk melakukan kegiatan wisata. Kegiatan wisata ini tentu akan meningkatkan *mobilitas* atau pergerakan perekonomian pada daerah yang menjadi kunjungan wisata. Tentu saja



pertumbuhan sektor perdagangan di daerah tersebut akan meningkat pula tergantung seberapa besar atau banyak jumlah kunjungan atau kedatangan dari wisatawan baik wisatawan asing maupun domestik.

Hal ini akan berpengaruh pada PAD yang diakibatkan dari penerimaan retribusi dan pajak daerah yang dikenakan terhadap wisatawan yang berkunjung pada daerah tersebut. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal, regional, atau lingkup nasional pada suatu negara erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut (Yoeti, 2008). Salah satu pajak yang cukup berperan penting terhadap penerimaan PAD adalah pajak hotel dan restoran. Khususnya pada penerimaan pajak restoran di kota Bukittinggi, tentu akan mengalami kenaikan atas jasa atau pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Oleh karena itu, semakin banyak atau kecilnya jumlah wisatawan yang berkunjung pada kota Bukittinggi tentu akan mempengaruhi total penerimaan pajak restoran di kota tersebut.

## **2.2 Tinjauan Literatur**

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran di kota Bukittinggi :

1. Penelitian yang dilakukan Qadarrahman (2010) mencoba mengungkapkan tentang antara PAD dan pariwisata. Hal ini adalah sangat rasional karena bila jumlah kunjungan wisata meningkat maka diharapkan akan terjadi peningkatan penerimaan PAD, secara tidak langsung akan menaikkan penerimaan pajak, khususnya pajak restoran dan hotel. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Keterkaitan industri pariwisata dengan



penerimaan daerah berjalan melalui jalur PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak. Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utamanya dengan memperhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti: jumlah obyek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun internasional, tingkat hunian hotel, dan tentunya pendapatan perkapita. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan penerimaan daerah sektor pariwisata sebagai variabel dependen dan empat variabel independen yaitu variabel jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dan pendapatan perkapita. Setelah dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik, hasilnya menunjukkan data terdistribusi normal dan tidak diperoleh suatu penyimpangan. Berdasarkan hasil perhitungan EViews 6 diperoleh nilai F hitung = 14,349 dengan signifikansi F sebesar 0.000. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 diperoleh nilai F tabel sebesar 2,31. Maka F hitung (14,349) > F tabel (2,61), atau signifikansi F sebesar 0,000 menunjukkan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen yaitu jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dan pendapatan perkapita secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Kota Semarang diterima. Secara parsial variabel jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel berpengaruh signifikan. Sedangkan variabel pendapatan perkapita tidak signifikan. Dan dari keempat variabel tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap penerimaan daerah dari

sektor pariwisata di Kota Semarang adalah variabel jumlah obyek wisata. Dengan nilai t-hitung sebesar 4,407 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,001.

2. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhendi (2008) yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Yogyakarta selama 15 tahun observasi yaitu dari tahun 1991 sampai dengan 2005. Data yang digunakan merupakan data sekunder, berasal dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kota Yogyakarta. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu produk domestik regional bruto, jumlah wisatawan mancanegara, jumlah penduduk, jumlah penginapan/hotel di Kota Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan adalah regresi log-linier. Berdasarkan uji t, variabel produk domestik regional bruto secara statistik terbukti tidak signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Yogyakarta, hal ini diduga karena tidak stabilnya sektor-sektor pendukung pesatnya kinerja perekonomian di Kota Yogyakarta. Variabel wisatawan nusantara berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran, sesuai dengan hipotesis yang ditetapkan. Variabel jumlah penduduk terbukti signifikan secara negatif, hal ini diduga karena penduduk atau masyarakat Yogyakarta dengan mudahnya dapat menjangkau tempat-tempat pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk berlibur, sehingga masyarakat tidak perlu bermalam atau menginap di hotel atau penginapan serta jumlah penginapan/hotel secara statistik terbukti secara signifikan sesuai dengan hipotesis yang ditetapkan.
3. Astabrata (2002) melakukan penelitian tentang analisis peranan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. Penelitian

ini menggunakan data-data *time series* selama 15 tahun dari tahun 1985-1999. Dari hasil analisis regresi sederhana diperoleh adanya pengaruh positif dan signifikan antara Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara PHR dengan APBD, dan antara PHR dengan PDRB Kabupaten Badung. Hal ini dapat diketahui dari masing-masing koefisien determinasinya (*adjusted R-square*) sebesar 0,99, 0,95, dan 0,61. Variabel yang paling berpengaruh terhadap penerimaan PHR dilihat dari hasil analisis regresi berganda adalah jumlah wisatawan mancanegara yang menginap di Kabupaten Badung, serta jumlah restoran yang ada di Kabupaten Badung. Hasil analisis regresi ini menjelaskan kondisi PHR didasarkan atas data-data yang digunakan dalam analisis bukan dijelaskan oleh kondisi yang ada. Dalam analisis regresi ini dibuktikan bahwa *adjusted R-square* sebesar 0,78 yang mendekati 1, sehingga semua variabel di atas berpengaruh cukup besar terhadap variabel PHR. Hal ini dapat dibuktikan secara statistik, baik secara individu masing-masing variabel ataupun secara bersama-sama variabel independen tersebut terhadap variabel PHR. Potensi PHR masih memungkinkan untuk dikembangkan. Terjadinya perbedaan antara penghitungan potensi dengan penerimaan PHR diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya manusia terutama dalam auditing data potensi PHR, yang tanpa disadari Kabupaten Badung akan kehilangan pajak tiap tahun.

4. Astuti (2000) juga melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh jumlah wisatawan, PDRB, dan jumlah penduduk secara individu maupun bersama sama berpengaruh terhadap Pajak Hotel dan Restoran di Kota Surakarta. Penelitian ini menjelaskan bahwa PDRB, Jumlah penduduk dan Jumlah

wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran restoran. Data yang digunakan adalah data sekunder dimana dengan data tahun 1990-2005. Sedangkan alat yang digunakan adalah analisa regresi linear berganda. Hasil analisa menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, didapatkan hasil bahwa faktor PDRB berpengaruh terhadap pajak hotel dan restoran pada Kota Surakarta secara individual. Demikian juga untuk faktor jumlah wisatawan ternyata juga berpengaruh terhadap pajak hotel dan restoran secara individual. Uji-F menunjukkan variable jumlah wisatawan, PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap pajak hotel dan restoran pada Kota Surakarta secara bersama-sama. Koefisien determinasi  $R^2$ , diperoleh nilai  $R$  squared adalah 0,971. Hal ini menunjukkan bahwa variable pajak hotel dan restoran benar-benar dijelaskan oleh jumlah wisatawan, PDRB dan jumlah penduduk sebesar 97,1%. Selebihnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Secara teori data dapat dikelompokkan dalam bentuk data primer dan data sekunder (Walpole, 1992). Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek-objek penelitian perorangan maupun organisasi. Sedangkan, data sekunder merupakan data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian, peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun non komersial.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang diperoleh dari lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi. Data yang dikumpulkan adalah data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi. Data yang dikumpulkan juga bersifat kuantitatif karena berupa angka-angka terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2001-2010.

#### **3.2 Pembentukan Model**

Menurut Mudrajat (2001) ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk mempengaruhi penerimaan Pajak Restoran. Meskipun secara teori ada beberapa faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pajak Restoran seperti PDRB, Jumlah penduduk, Sumber Daya Manusia dan Kebijakan. Berdasarkan model yang dikembangkan oleh Mudrajat tersebut, penelitian ini akan mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran di kota



bukit tinggi. Dimana faktor tersebut adalah PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kunjungan Wisatawan.

Penelitian ini menggunakan peralatan ekonometrik untuk keperluan estimasi. Alat yang biasa digunakan dalam melakukan penelitian adalah analisis regresi. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi atau ketergantungan suatu variabel yaitu variabel yang tergantung kepada variabel lain, yang dinamakan variabel bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dengan meramalkan nilai suatu populasi dengan nilai tertentu dari variabel yang diketahui (Gujarati, 1995).

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda sebagaimana yang dikemukakan oleh Gujarati tersebut diatas, maka di dalam pengujian ini yang menjadi variabel adalah sebagai berikut:

Y = Penerimaan Pajak Restoran

X<sub>1</sub> = PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

X<sub>2</sub> = Jumlah Penduduk

X<sub>3</sub> = Kunjungan Wisatawan

### 3.3 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Penerimaan Pajak Restoran (Y)

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Objek Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Subjek Pajak Restoran adalah

orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha restoran. Tarif yang ditetapkan paling tinggi 10 % dan disesuaikan dengan perda daerah tersebut. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah penerimaan pajak restoran di kota Bukittinggi tahun 2001-2010.

## 2. PDRB ( $X_1$ )

Indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah untuk daerah tingkat provinsi/kabupaten adalah PDRB. PDRB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi didalam suatu daerah tertentu dalam satu tahun tertentu. PDRB yang dimaksud adalah laju PDRB atas dasar harga konstan (2000) di Kota Bukittinggi tahun 2001-2010 (dalam jutaan rupiah).

## 3. Jumlah Penduduk ( $X_2$ )

Jumlah penduduk merupakan banyaknya penduduk yang bertempat tinggal pada suatu daerah. Dalam penelitian ini menggunakan jumlah penduduk yang ada di kota Bukittinggi, selama kurun waktu 2001-2010.

## 4. Jumlah Kunjungan Wisatawan ( $X_3$ )

Wisatawan merupakan orang yang melakukan kegiatan pariwisata, sedangkan pariwisata mempunyai artian, yaitu perjalanan penuh mulai dari berangkat dari suatu tempat ke satu atau berbagai tempat lain dan singgah kemudian kembali ke tempat semula dengan tujuan melakuakn wisata pada tempat-tempat yang dikatakan sebagai objek wisata. Jumlah Kunjungan Wisatawan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Bukittinggi dari tahun 2001-2010.

### 3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data

#### 3.4.1 Metode Kualitatif

Metode yang digunakan pada analisis variabel-variabel yang tidak dapat diukur atau menggunakan analisis yang sifatnya menguraikan dalam bentuk kalimat.

#### 3.4.2 Metode kuantitatif

Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi. Pemrosesan dan manipulasi data mentah menjadi informasi yang bermanfaat, inilah yang merupakan jantung dari analisis kuantitatif.

Berdasarkan model yang dikemukakan di atas, maka di dalam pengujian ini dilakukan secara kuantitatif. Untuk melakukan penelitian itu digunakan persamaan linear berganda.

Adapun persamaan regresi linear berganda diturunkan sebagai fungsi:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

Dimana:

Y = Penerimaan Pajak Restoran

X<sub>1</sub> = PDRB

X<sub>2</sub> = Jumlah Penduduk

X<sub>3</sub> = Kunjungan Pariwisata

Melihat persamaan di atas, maka persamaan dirubah dalam bentuk *Double Log transformation*, dengan memakai metode *Ordinary Least Squares*. *Double Log transformation* dipakai untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen dalam bentuk persentase terhadap variabel

dependen, maka persamaannya dijadikan dalam bentuk log. Sehingga persamaan diatas dapat dirubah menjadi (Gujarati, 1995):

$$\text{Log } Y = a + b_1 \text{Log } X_1 + b_2 \text{Log } X_2 + b_3 \text{Log } X_3 + U_a$$

Log Y = Penerimaan Pajak Restoran

Log  $X_1$  = PDRB

Log  $X_2$  = Jumlah Penduduk

Log  $X_3$  = Kunjungan Pariwisata

a = Konstanta

$b_1, b_2, b_3$  = Koefisien Regresi

$U_a$  = Variabel Pengganggu

### 3.5 Uji Hipotesis

#### 1. Pengujian Hipotesa dengan t-test

Dalam uji ini akan dilihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individual yaitu pengujian terhadap variabel Pajak Restoran yang terdiri dari : PDRB, Jumlah Penduduk dan Kunjungan Pariwisata.

a.  $H_0 = b_i = 0, i = 1, 2, 3 \dots k$ , berarti variabel independen tidak mempengaruhi besarnya penerimaan penerimaan Pajak Restoran di Kota Bukittinggi.

$H_a = b_i \neq 0, i = 1, 2, 3 \dots k$ , berarti variabel independen mempengaruhi besarnya penerimaan penerimaan Pajak Restoran di Kota Bukittinggi.

b. Penentuan daerah kritis dalam hal ini menggunakan pengujian satu sisi (one tailed test) dan terlebih dahulu menentukan tingkat signifikan  $\alpha$  dan df sehingga nantinya akan dicatat nilai t-tetap. Jika ternyata t-hitung  $>$  t-tabel maka hipotesis  $H_0$  ditolak yang berarti variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen.

## 2. Pengujian Hipotesa dengan F-test

Pengujian ini dimaksudkan agar dapat diketahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. langkah-langkah yang diambil yaitu:

- a.  $H_0 = b_1 = 0$ , dimana  $b_1$  merupakan koefisien elastisitas  $H_a = b_1 \neq 0$
- b. Penentuan daerah kritis dengan menggunakan pengujian satu sisi (One Tailed Test) yang terlebih dahulu ditentukan signifikan lefelnya, sehingga akan didapatkan nilai F-tabel.

Jika  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$  maka  $H_0$  akan ditolak yang berarti variabel independen secara uji bersama berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.

## 3. Pengujian Hipotesa dengan Determinasi ( $R^2$ )

Digunakan untuk melihat seberapa besar persentase dari keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dan seberapa besar persentase faktor-faktor lain berpengaruh yang tidak terdapat di dalam model. Nilai  $R^2$  terletak antara 0 dan 1. Jika  $R^2$  mendekati 1, maka hal ini berarti semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika  $R^2$  adalah 0 maka variabel independen tidak dapat menjelaskan apa pun tentang variabel dependen.

## 4. Pengujian Asumsi Klasik

- a. Melakukan uji Normalitas

Menurut Ghozali (2001) dalam mendeteksi kenormalan data dengan grafik Normal P-Plot, titik-titik yang terbentuk harus menyebar di sekitar garis lurus serta arah penyebarannya mengikuti arah garis lurus yang tidak terpenjar jauh dari



garis lurus. Jika grafik residual memiliki penyimpangan data yang besar sehingga jauh dari garis lurus maka model regresi tidak memenuhi asumsi Normalitas, begitu juga sebaliknya.

#### b. Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari kesalahan residual melalui satu pengamatan ke pengamatan yang lain. (Santoso, 2002). Dengan kata lain pengujian ini dimaksudkan untuk melihat jarak kuadrat titik-titik sebaran terhadap garis regresi. Heterosdastisitas berarti bahwa variabel terikat menunjukkan tingkat variance yang berbeda antar variable predictor. Deteksi adanya heteroskedastisitas dengan melihat kurva heterodastisitas atau metode chart (diagram scatterplot), dengan dasar pemikiran sebagai berikut :

- Jika titik-titik terikat menyebar secara acak membentuk pola tertentu yang beraturan (bergelombang), melebar kemudian menyempit, maka terjadi hterosdastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar baik di bawah atau di atas 0 pada sumbu y maka hal ini tidak terjadi heterosdastisitas. Di dalam regresi diharapkan tidak terjadi heterosdastisitas (Algifari, 2000).

#### c. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan sempurna antar independent variable pada model regresi (Santoso, 2002). Dalam hal ini yang akan diuji bukan ada tidaknya multikolinieritas namun berbahaya atau tidaknya, sebab tidak ada suatu persamaanpun tanpa multikolinieritas. Uji terhadap multikolinieritas merupakan pengujian untuk

melihat adanya keterkaitan hubungan antar variabel independent. Penelitian yang mengandung multikolinieritas akan berpengaruh terhadap hasil penelitian sehingga penelitian tersebut menjadi tidak berfungsi.

Cara untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dilakukan dengan cara meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance value* (Gujarati, 1995). Jika nilai VIF kurang dari 10 atau nilai *tolerance* lebih dari 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak memiliki gejala multikolinieritas. Jika terdapat multikolinieritas dapat diambil tindakan perbaikan sebagai berikut :

- Mengeluarkan satu dari variabel yang berkolinear
- Penambahan data baru
- Mentransformasikan data
- Menggunakan Etraneous atau informasi sebelumnya
- Mengkombinasikan data Cross Sectional dan data deretan waktu

Dampak adanya multikolinieritas adalah sebagai berikut ( Al Husin 2002) :

- Pengaruh masing-masing variabel bebas tidak dapat dideteksi atau sulit dibedakan.
- Kesalahan standar estimasi cenderung meningkat dengan makin bertambahnya variabel bebas.
- Tingkat signifikansi yang digunakan untuk menolak hipotesa adalah semakin besar.
- Kesalahan standar bagi masing-masing koefisien yang diduga sangat besar, akibatnya nilai t menjadi sangat rendah.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

#### 4.1 Deskripsi Objek Penelitian

##### 4.1.1 Keadaan Geografis

Kota Bukittinggi terletak antara  $100,20^{\circ}$ -  $100,25^{\circ}$  bujur timur dan  $00,16^{\circ}$ -  $00,20^{\circ}$  lintang selatan. Memiliki luas daerah sekitar  $25,24 \text{ km}^2$ . Luas tersebut merupakan 0,06 persen dari luas keseluruhan dari propinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi dikenal dengan Kota "TRIARGA" julukan ini muncul karena kota Bukittinggi diapit oleh tiga buah gunung yaitu Gunung Singgalang, Gunung Merapi dan Gunung Sago. Kota ini terletak pada ketinggian 780 - 950 m dari permukaan laut. Topografi kota Bukittinggi berbukit dan berlembah, terbentang sebuah lembah yang khas dan diberi nama Ngarai Sianok. Kota Bukittinggi mempunyai iklim pegunungan yang sejuk dengan temperature udara berkisar  $16,1^{\circ}$  -  $24,9^{\circ}\text{C}$ , kelembapan udara 82,0 - 90,8 % dan tekanan udara antara  $22^{\circ}\text{C}$  -  $25^{\circ}\text{C}$  serta curah hujan rata-rata 136,4 mm/tahun. Tanah merupakan lapisan tuff dari lereng gunung merapi yang subur. Tata guna lahan sebagian besar digunakan untuk hotel, pemukiman dan pasar.

##### 4.1.2 Penduduk Dan Luas Wilayah

Jumlah penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2010 adalah 111.312 jiwa. Penyebaran penduduk Kota Bukittinggi dimana penduduk yang paling banyak adalah di kecamatan Mandiangin Kota Selayan yaitu 40,36 persen. Tingginya tingkat penyebaran penduduk di kecamatan ini ditandai dengan banyaknya pembangunan perumahan baik yang dilakukan oleh perusahaan pengembang maupun oleh perorangan.

Namun demikian Kecamatan Guguk Panjang masih menjadi Kecamatan dengan tingkat kepadatan paling tinggi yaitu 6.096 jiwa per Km<sup>2</sup>, diikuti dengan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 3.957 jiwa per Km<sup>2</sup> dan kecamatan Mandiangin Koto selayan sebanyak 3.620 jiwa per Km<sup>2</sup>.

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah, Rumah Tangga, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2010**

Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Rumah Tangga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan
Guguk Panjang	6,831	10.264	20.169	21.474	41.643	6.096
Mandiangin Koto Selayan	12,156	10.585	22.031	22.897	44.928	3.696
Aur Birugo Tigo Baleh	6,252	6.090	11.645	13.096	24.741	3.957
<b>Jumlah</b>	<b>25,239</b>	<b>26.939</b>	<b>53.845</b>	<b>57.467</b>	<b>111.312</b>	<b>4.410</b>

Sumber : BPS Bukittinggi, Bukittinggi Dalam Angka 2010

Sebahagian besar penduduk Kota Bukittinggi mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang dan wirausaha. Jenis usaha yang dijalankan penduduk di Kota Bukittinggi umumnya bergerak di bidang jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi, serta di bidang perhotelan dan restoran.

## 4.2 Analisis Data

### 4.2.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bukittinggi

Secara umum, faktor-faktor yang akan menentukan dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, antara lain yaitu (Kaho, 1997):

1. Faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah.



3. Faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah .
4. Faktor organisasi dan manajemen yang merupakan sarana untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara baik, efisien, dan efektif.

Dalam hal ini, otonomi yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan melakukan pengelolaan sendiri terhadap potensi-potensi daerah. Dengan kinerja yang baik pemerintah daerah pasti bisa memaksimalkan pendapatan daerah tersebut, dimana dalam aplikasinya PAD tersebut juga digunakan untuk mengatur dan membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama dalam memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak.

Pajak restoran merupakan salah satu penyumbang dari PAD bagi suatu daerah untuk melakukan kegiatan mengatur dan pembiayaan dari daerah tersebut. Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering (UU No. 28 Tahun 2009). Dalam Hal ini Pemerintah Daerah kota Bukittinggi telah menetapkan peraturan terhadap tarif yang dikenakan untuk pajak restoran sebesar 10 persen, yang tertera pada perda kota Bukittinggi no 13. Peraturan Daerah tersebut mulai berlaku pada tahun 2004. Untuk lebih jelas mengenai perkembangan penerimaan Pajak Restoran dapat dilihat dalam tabel 4.2.



**Tabel 4.2**  
**Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2001 – 2010**

<b>Tahun</b>	<b>Target (rupiah)</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Realisasi (%)</b>
2001	545.200.000	579.805.983	106,35
2002	614.600.000	647.937.911	105,42
2003	706.400.000	720.018.061	101,93
2004	761.407.644	796.407.644	104,60
2005	901.576.146	971.931.702	107,80
2006	1.033.000.000	1.271.137.611	123,05
2007	1.092.000.000	1.589.640.937	145,57
2008	1.360.000.000	2.016.895.646	148,30
2009	1.849.240.000	2.254.283.486	121,90
2010	3.600.000.000	2.503.937.133	69,55
<b>Capaian Realisasi Rata – rata</b>			<b>113,45%</b>

*Sumber : DISPENDA (DPKAD) Bukittinggi.*

Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi penerimaan pajak restoran di kota Bukittinggi cukup baik, setiap tahunnya hampir bisa melewati dari target yang ditentukan. Pada tahun 2001-2003 terjadi penurunan sebesar 106,35 persen turun menjadi 101,93 persen. Tetapi pada tahun berikutnya selalu mengalami peningkatan dari tahun 2004-2008 yaitu sebesar 104,60 persen menjadi 148,30 persen.

Penurunan drastis hanya terjadi pada tahun 2009 sebesar 121,90 persen dimana pada tahun sebelumnya 148,30 persen dan 2010 sebesar 69,55 persen. Penurunan dari capaian realisasi ini mungkin disebabkan gempa yang terjadi di penghujung 2009 di Sumatera Barat, yang menyebabkan beberapa akses untuk mengoptimalkan target pajak restoran mengalami hambatan. Sedangkan pencapaian realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 148,30 persen, dengan capaian realisasi rata-rata 113,45 persen.

**Tabel 4.3**  
**Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak**  
**Restoran di Kota Bukittinggi 2001 – 2010**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (rupiah)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
2001	579.805.983	-
2002	647.937.911	11,75
2003	720.018.061	11,12
2004	796.407.644	10,61
2005	971.931.702	22,04
2006	1.271.137.611	30,78
2007	1.589.640.937	25,06
2008	2.016.895.646	26,88
2009	2.254.283.486	11,77
2010	2.503.937.133	11,07
<b>Pertumbuhan Rata – rata</b>		<b>16,11%</b>

*Sumber : DISPENDA (DPKAD) Bukittinggi.*

Dalam perkembangannya, penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi selalu mengalami kenaikan, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 30,78 persen, dikarenakan pada tahun yang sama pertumbuhan perekonomian dan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Bukittinggi juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yang menyebabkan pada tahun ini pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi juga mengalami kenaikan. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2004 yaitu 10,61 persen. Salah satu penyebabnya dikarenakan pada tahun yang bersamaan jumlah pertumbuhan kunjungan wisatawan di Kota Bukittinggi sangatlah rendah, hanya sebesar 5,32 persen dibandingkan tahun-tahun yang lain dalam kurun waktu 2001-2010. Sedangkan pertumbuhan rata-rata per tahun penerimaan pajak restoran di kota bukittinggi dalam kurun waktu 2001-2010 yaitu sebesar 16,19 persen.

#### 4.2.2 Perkembangan PDRB Kota Bukittinggi

Produk domestik bruto merupakan salah satu indikator umum yang dapat menggambarkan kegiatan ekonomi suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB mencakup seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari wilayah tersebut. Nilai PDRB yang semakin tinggi dengan diikuti pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukkan perekonomian semakin membaik., yang menggambarkan bahwa produk barang dan jasa yang dihasilkan semakin meningkat.

Sebaliknya peningkatan nilai PDRB tanpa diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa perekonomian daerah tersebut dalam kondisi tidak baik (Sertiati, 2003). Pertumbuhan ekonomi yang terjadi setiap tahunnya tidak lepas dari perkembangan masing-masing faktor atau sub sektor yang ikut membentuk nilai tambah perekonomian suatu daerah dan merupakan dampak nyata dari suatu kondisi yang terjadi tiap tahunnya.

Menurut konsep teori ekonomi makro dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan PDB atau PDRB yang dinyatakan dalam persentase selama periode tertentu yaitu 1 tahun (Dorn Bush, 2004). Selanjutnya (Todaro, 1999) mengemukakan bahwa ada tiga faktor atau komponen utama yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu; akumulasi modal (*capital accumulation*), pertumbuhan penduduk (*population growth*), dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Sementara itu, Kuznets dalam (Todaro, 1999) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang akibat adanya kemajuan teknologi, perkembangan kelembagaan serta ideologis terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang ada. Sedangkan

menurut (Boediono ,1992), pertumbuhan ekonomi adalah merupakan proses kenaikan output per-kapita dalam jangka panjang dan terus menerus.

Untuk menganalisa capaian kinerja pembangunan bidang perekonomian dari analisis makro dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan secara berkala. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan. PDRB Atas dasar harga tetap (konstan), yaitu apabila semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan dinilai berdasarkan harga pada tahun tertentu yang dipilih (ditetapkan) sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan ini, mencerminkan pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun (Sadono Soekirno, 2004).

**Tabel 4.4**  
**Jumlah dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2001 – 2010**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah PDRB Dengan Atas Dasar Harga Konstan 2000 (juta rupiah)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
2001	616.840,58	-
2002	645.877,20	4,71
2003	681.527,69	5,52
2004	717.828,85	5,33
2005	762.433,07	6,21
2006	809.613,62	6,19
2007	862.157,54	6,49
2008	918.914,69	6,58
2009	969.590,88	5,51
2010	1.028.923,29	6,12
<b>Pertumbuhan Rata – rata</b>		<b>5,27%</b>

Sumber : BPS Bukittinggi, Bukittinggi Dalam Angka 2010

Selama periode ini dalam kurun waktu (2001-2010), pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 di kota Bukittinggi terendah terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 4,71 persen dan tertinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar 6,58



persen dengan laju pertumbuhan rata-rata PDRB atas dasar harga konstan mencapai pertumbuhan sebesar 5,27 persen pertahun. Pertumbuhan kontribusi sektor lapangan usaha terhadap total PDRB nya ini dapat kita pahami dengan melihat table 4.5

**Tabel 4.5**  
**Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap Total PDRB Di Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2001-2010**

LAPANGAN USAHA	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-Rata
1. PERTANIAN	5,54	5,11	4,65	3,53	2,81	2,59	2,32	2,05	1,94	1,87	3,24
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0	0	0,02
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	16,65	15,31	14,67	13,65	11,89	10,86	10,77	10,68	10,37	10,22	12,51
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	5,48	5,01	3,55	3,29	3,1	2,35	2,38	2,34	2,21	2,09	3,18
5. BANGUNAN	3,31	3,57	3,61	3,66	3,71	3,74	3,71	3,7	3,66	3,57	3,62
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	14,18	15,67	17,12	18,73	19,21	20,76	20,95	21,28	21,41	21,33	19,06
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	17,48	18,12	19,35	20,24	22,56	23,48	23,67	23,38	24,03	24,14	21,65
8. KEUANGAN, PERSEWAAN	9,06	9,21	9,35	9,52	9,71	9,84	9,89	10,39	10,11	10,25	9,73
9. JASA-JASA	28,25	27,95	27,66	27,35	26,98	26,36	26,3	26,17	26,27	26,53	26,98
<b>PDRB</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Bukittinggi, Bukittinggi Dalam Angka 2010

Struktur perekonomian daerah Kota Bukittinggi masi didominasi oleh 3 sektor lapangan usaha yaitu Jasa-Jasa, Pengangkutan dan Komunikasi, serta sector Perdagangan, Hotel dan Restoran. Rata-rata kontribusi sektor lapangan usaha yang berhubungan dengan Jasa-Jasa dari tahun 2001-2010 terhadap total PDRB adalah sebesar 26,98 persen sedangkan rata-rata kontribusi sektor lapangan usaha Pengangkutan dan Komunikasi adalah 21,65 persen. Kontribusi sektor lapangan usaha terbesar ketiga Perdagangan, Hotel dan Restoran adalah 19,06 persen terhadap total PDRB, artinya kontribusi sektor perdagangan terhadap penerimaan total

PDRB di Kota Bukittinggi masih cukup besar. Dapat kita lihat kontribusi terbesar ada pada sektor lapangan usaha Jasa-Jasa yaitu 26,98 persen dan yang terkecil ada pada sektor lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yaitu 0,02 persen terhadap total PDRB yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2001-2010.

#### **4.2.3 Kependudukan Kota Bukittinggi**

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu: fertilitas, mortalitas dan migrasi. Demografi, diartikan sebagai studi statistik dan matematik terhadap besaran, komposisi, sebaran, serta perubahan-perubahannya yang terjadi dari waktu ke waktu pada populasi manusia melalui berlangsungnya lima proses: fertilitas, mortalitas, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial (Bogue, 1969).

Ada beberapa istilah dalam Kependudukan dan Ketenagakerjaan antara lain:

1. Rata-rata Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.
2. Kepadatan Penduduk adalah banyaknya penduduk per km persegi.
3. Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk lakilaki untuk 100 penduduk perempuan.
4. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

5. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
6. Bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).
7. Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam 1 digit.
8. Status Pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.
9. Pekerja Tak Dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/ keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji.
10. Penduduk yang menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan menurut referensi waktu tertentu.

Kota Bukittinggi merupakan kota yang cukup padat yang ada di Propinsi Sumatera Barat. Dimana perkembangan jumlah penduduk dan pertumbuhan kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2001-2010 dapat kita lihat pada tabel 4.6

**Tabel 4.6**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2001 – 2010**

Tahun	Jumlah Penduduk (orang)	Pertumbuhan (%)
2001	93.282	-
2002	94.350	1,14
2003	99.551	4,45
2004	100.333	0,81
2005	101.276	0,94
2006	102.228	0,94
2007	104.278	2,01
2008	106.045	1,69
2009	107.805	1,66
2010	111.312	3,25
<b>Pertumbuhan Rata – rata</b>		<b>1,79%</b>

*Sumber : BPS Bukittinggi, Bukittinggi Dalam Angka 2010*

Perkembangan pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Bukittinggi dapat kita lihat pada tabel 4.6, bahwa tahun 2003 terjadi pertumbuhan yang sangat menanjak dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 4,45 persen, namun pada tahun berikutnya jumlah penduduk mengalami penurunan 0,81 persen pada tahun 2004. Pada tahun 2004 tersebut adalah penurunan terendah. Kemudian pada tahun berikutnya pertumbuhan jumlah penduduk mulai stabil. Hanya pada tahun 2001 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 3,25 persen, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,79 persen. Sedangkan untuk jumlah pencari kerja yang terdaftar menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat kita lihat pada table 4.7 sebagai berikut:



**Tabel 4.7**  
**Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut**  
**Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2010**

Pendidikan Yang Ditamatkan	Belum Ditempatkan			Terdaftar			Di Tempatkan Tahun Ini		
	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total
<b>SD/ SLTP</b>	0	2	2	1	2	3	1	0	1
<b>SLTA</b>	163	114	227	172	168	340	9	54	63
<b>Akademik</b>	49	82	131	78	185	263	29	103	132
<b>Perguruan Tinggi</b>	113	236	349	159	338	490	46	102	148
<b>Jumlah Total</b>	<b>325</b>	<b>434</b>	<b>709</b>	<b>410</b>	<b>693</b>	<b>1.096</b>	<b>85</b>	<b>259</b>	<b>344</b>

*Sumber : BPS Bukittinggi, Bukittinggi Dalam Angka 2010*

Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2010 dari berbagai tingkatan jenjang pendidikan berjumlah 1.096 orang. Angka ini jauh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 1.311 para pencari kerja. Dari jumlah tersebut yang berhasil ditempatkan sebanyak 344 orang dengan rician 85 orang laki-laki dan 259 orang perempuan.

#### **4.2.4 Perkembangan Kunjungan Wisatawan Di Kota Bukittinggi**

Pembangunan kepariwisataan dalam kerangka pembangunan nasional tampaknya akan tetap menjadi sektor unggulan, mengingat besarnya peran sektor ini dalam pembangunan nasional. Penetapan ini merupakan hal yang wajar karena dilatarbelakangi oleh beberapa hal, diantaranya perolehan devisa dalam sektor pariwisata relative besar dalam beberapa tahun belakangan ini, tidak berpengaruh gejala nya perekonomian pada sektor ini dibandingkan sektor industry pengolahan serta pengaruh langsung atau tidak langsung dari sektor ini yang dapat menciptakan kesempatan usaha, lapangan pekerjaan, perkembangan daerah, dan perkembangan seni dan budaya (Nugroho, 1995).

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Keterkaitan industri pariwisata dengan penerimaan daerah berjalan melalui jalur PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak, menurut Tambunan yang dikutip oleh Rudy Badrudin (2001), bahwa industri pariwisata yang menjadi sumber PAD adalah industri pariwisata milik masyarakat daerah (*Community Tourism Development* atau CTD). Dengan mengembangkan CTD pemerintah daerah dapat memperoleh peluang penerimaan pajak dan beragam retribusi resmi dari kegiatan industri pariwisata yang bersifat multisektoral, yang meliputi hotel, restoran, usaha wisata, usaha perjalanan wisata, *profesional convention organizer*, pendidikan formal dan informal, pelatihan dan transportasi.

Menurut (Sapta Nirwandar ,2004) pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu negara tidak terkecuali di Indonesia. Namun demikian pada prinsipnya pariwisata memiliki spectrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara. Pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk :

#### 1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pariwisata mampu memberikan perasaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Sehingga dengan banyaknya warganegara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan timbul rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

## 2. Penghapusan Kemiskinan (*Poverty Alleviation*)

Pembangunan pariwisata seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

## 3. Pembangunan Berkesinambungan (*Sustainable Development*)

Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramahtamahan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Bahkan berdasarkan berbagai contoh pengelolaan kepariwisataan yang baik, kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi wisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pengembangan kepariwisataan di daerahnya.

## 4. Pelestarian Budaya (*Culture Preservation*)

Pembangunan kepariwisataan seharusnya mampu kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan di berbagai daerah.

## 5. Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia

Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan *skema paid holidays*.

## 6. Peningkatan Ekonomi dan Industri

Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa, seperti industri kerajinan yang ada di daerah wisata tersebut. Syarat utama dari hal tersebut di atas adalah kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dunia dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang berkualitas.

## 7. Pengembangan Teknologi

Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Pada daerah-daerah tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan tepat guna yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat



fundamental. Kepariwisata akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Keragaman produk dan potensi pariwisata yang ada ditambah dengan tersedianya fasilitas penunjang pariwisata yang memadai seperti penginapan, fasilitas rekreasi, tempat dan atraksi wisata, merupakan aset pariwisata yang besar dan dapat menjadi faktor penunjang dalam pengembangan industri pariwisata bagi Kota Bukittinggi. Berikut adalah tabel kunjungan wisatawan di Kota Bukittinggi dalam kurun waktu dari 2001-2010.

**Tabel 4.8**  
**Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung di**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2001 – 2010**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Kota Bukittinggi</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
2001	134.207	-
2002	148.309	8,4
2003	164.510	14,79
2004	173.260	4,1
2005	183.904	7,38
2006	240.738	30,9
2007	266.814	6,68
2008	293.494	14,28
2009	309.413	4,4
2010	329.922	7,68
<b>Pertumbuhan rata – rata</b>		<b>9,86%</b>

Perkembangan keadaan pariwisata di Kota Bukittinggi mengalami pertumbuhan yang sangat berfluktuasi, dapat kita lihat pada tahun 2006 merupakan pertumbuhan yang sangat pesat dalam kunjungan wisatawan di kota Bukittinggi, yaitu mengalami kenaikan 30,90 persen dengan jumlah wisatawan

240.738 orang wisatawan. Dikarenakan pada tahun 2006 kota Bukittinggi mengalami perbaikan infrastruktur di dalam kepariwisataan sehingga membuat wisatawan tertarik untuk mengunjungi objek-objek pariwisata yang ada di kota Bukittinggi. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 4,10 persen dengan total jumlah wisatawan yang berkunjung 173.260 wisatawan, hal ini disebabkan tahapan sosialisasi dengan diberlakukannya perda yang baru tentang pajak dan retribusi yaitu perda no 13 dan perda no 14 mengenai pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah kota Bukittinggi, sehingga mempengaruhi kunjungan wisata, dimana rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya dalam kurun waktu 2001-2010 adalah 9,86 persen.

**Tabel 4.9**  
**Jumlah Wisatawan Domestik dan Asing**  
**Yang Berkunjung di Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2001 – 2010**

Tahun	Jumlah Wisatawan		Pertumbuhan Wisatawan Domestik	Pertumbuhan Wisatawan Asing
	Domestik	Asing		
2001	122.752	11.455	-	-
2002	135.561	12.748	10,43	11,29
2003	151.191	13.319	11,53	4,48
2004	158.936	14.324	5,12	7,55
2005	167.184	16.756	5,19	16,98
2006	217.215	23.523	29,93	40,39
2007	236.386	30.428	8,83	29,35
2008	260.024	33.470	10,00	10,00
2009	275.068	34.345	5,79	2,61
2010	291.531	38.391	5,99	11,78
<b>Pertumbuhan rata-rata</b>			<b>10,43%</b>	<b>14,96%</b>

Sumber : BPS Bukittinggi, Bukittinggi Dalam Angka 2010

Tahun 2006 juga merupakan pertumbuhan yang sangat pesat dalam kunjungan wisatawan di kota Bukittinggi baik domestic maupun asing, yaitu mengalami kenaikan 29,93 persen dan 40,39 persen dengan jumlah wisatawan

217.215 orang dan 23.523 wisatawan asing. Sedangkan pertumbuhan terendah untuk kunjungan wisatawan domestic terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 5,12 persen dengan total jumlah wisatawan yang berkunjung 158.936 orang. Namun bagi wisatawan asing pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 2,61 persen dengan jumlah 34.345 wisatawan. Hal ini disebabkan bencana alam gempa yang melanda propinsi Sumatera Barat dan juga berdampak terhadap pariwisata khususnya kota Bukittinggi. Pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya adalah 10,43 persen untuk wisatawan domestic dan 14,96 untuk kunjungan wisatawan asing.



## BAB V

### PENEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

#### 5.1 Penemuan Empiris

Dalam bahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Restoran, yaitu : PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah Wisatawan.

Dalam melakukan pengujian empiris, digunakan persamaan regresi linear berganda yang dalam prosesnya diubah menjadi bentuk logaritma. Pengujian ini menggunakan data *time series* dalam kurun tahun 2001 – 2010. Dari persamaan yang diuji memperlihatkan model yang dibentuk dimana variabel bebas, yaitu : PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah Wisatawan di Kota Bukittinggi mempunyai kemampuan untuk menjelaskan variabel terikat, yaitu: Penerimaan Pajak Restoran.

Dari persamaan yang di uji memperlihatkan model yang dibentuk mempunyai kemampuan untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dimana diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\text{Log } Y = - 17,16 + 2,36 \text{ Log } X_1 + 0,34 \text{ Log } X_2 + 0,32 \text{ Log } X_3$$

#### 5.2 Pengujian Hipotesis

##### 5.2.1 Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.986(a)	.972	.958	.06663



Nilai  $R$  pada intinya untuk mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan dependen variabel. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh  $R$  sebesar 0,986 (98,6 persen). Hal ini menunjukkan bahwa PDRB, jumlah penduduk dan jumlah kunjungan wisatawan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penerimaan pajak restoran. Dasar untuk mengatakan hubungan ini erat adalah apabila nilai  $R$  diatas 50%.

Sedangkan  $R$  square atau nilai koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  adalah nilai diantara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  sebesar 0,972 mempunyai arti bahwa PDRB, jumlah penduduk dan jumlah kunjungan wisatawan mampu menjelaskan tentang penerimaan pajak restoran sebesar 97,2 persen, sedangkan sisanya sebesar 0,028 persen lain dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya.

### **5.2.2 Uji simultan (F Test)**

Untuk mengetahui apakah PDRB, jumlah penduduk dan jumlah kunjungan wisatawan secara bersama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi, dilakukan uji statistik F. Hasil pengujian dengan SPSS adalah sebagai berikut :

## ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.922	3	.307	69.249	.000(a)
	Residual	.027	6	.004		
	Total	.949	9			

a Predictors: (Constant), LogX3, Log X1, LogX2

b Dependent Variable: LogY

Dari hasil pengujian dapat dilihat bahwa variabel PDRB, jumlah penduduk dan jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F-hitung (69,249) yang lebih besar dari pada F-tabel (4.757) pada tingkat kepercayaan 97,2 persen, dengan tingkat signifikan 0,000. Signifikan F sebesar 0,000 menunjukkan tingkat kesalahan model yang diajukan. Nilai ini menunjukkan tingkat kesalahan yang akan ditanggung peneliti jika menolak hipotesa. Dengan demikian, maka tingkat kesalahan yang akan ditanggung kalau peneliti mengatakan bahwa variabel independen (PDRB, jumlah penduduk dan jumlah kunjungan wisatawan) mampu menjelaskan variabel dependent (penerimaan pajak restoran) adalah 0,000. Tingkat ini sangat jauh di bawah  $\alpha$  yang sudah ditetapkan di awal yaitu 5%. Berdasarkan hasil tersebut dapat di simpulkan bahwa PDRB, jumlah penduduk dan jumlah kunjungan wisatawan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi.

### 5.2.3 Analisis Koefisien Regresi

## Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-17.159	2.043		-8.401	.000
	LogX1	2.362	0.220	.891	10.752	.000
	LogX2	.339	.106	.234	3.189	.019
	LogX3	.316	.111	.225	2.836	.030

a Dependent Variable: Log Y

Dari tabel di atas didapatkan persamaan regresi fungsi adalah :

$$\text{Log } Y = -17,16 + 2,36 \text{ Log } X_1 + 0,34 \text{ Log } X_2 + 0,32 \text{ Log } X_3$$

(10,752)            (3,189)            (2,836)

Keterangan :

- Log Y        = Penerimaan Pajak Restoran  
Log X<sub>1</sub>      = PDRB  
Log X<sub>2</sub>      = Jumlah Penduduk  
Log X<sub>3</sub>      = Jumlah Kunjungan Wisatawan

Dari persamaan model regresi tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Koefisiensi regresi Log X<sub>1</sub> (PDRB) sebesar 2,36 menyatakan bahwa setiap perubahan PDRB sebesar 1 persen akan menyebabkan penerimaan pajak restoran akan meningkat sebesar 2,36 persen. Koefisien ini membuktikan adanya hubungan positif dari PDRB dengan penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi.
2. Koefisiensi regresi Log X<sub>2</sub> (jumlah penduduk) sebesar 0,34 menyatakan bahwa setiap perubahan jumlah penduduk sebesar 1 persen akan menyebabkan penerimaan pajak restoran akan meningkat sebesar 0,34 persen. Koefisien ini membuktikan adanya hubungan positif dari jumlah penduduk dengan penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi.
3. Koefisiensi regresi Log X<sub>3</sub> (jumlah kunjungan wisatawan) sebesar 0,32 menyatakan bahwa setiap perubahan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 1 persen akan menyebabkan penerimaan pajak restoran akan meningkat sebesar

0,32 persen. Koefisien ini membuktikan adanya hubungan positif dari jumlah kunjungan wisatawan dengan penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi.

#### 5.2.4 Uji Parsial (T test)

Analisa yang selanjutnya dilakukan adalah Uji t, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji signifikansi nilai parameter hasil regresi. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabelnya. Bila t-hitung hasil regresi lebih besar dari t-table, maka hipotesis alternatif akan diterima. Namun jika sebaliknya t-hitung regresi lebih kecil dari nilai t-table, maka hipotesis alternative akan ditolak.

Dari model regresi berganda yang diperoleh dari hasil pengujian akan dijelaskan pengaruh variable bebas secara parsial (satu per satu) terhadap variable terikat yaitu Penerimaan Pajak Restoran

##### 1. PDRB ( $\text{Log } X_1$ )

Pengujian yang pertama dilakukan terhadap variable PDRB ( $\text{Log } X_1$ ), pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak Restoran ( $\text{Log } Y$ ) dapat dilihat pada Tabel diatas. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa  $\text{Log } X_1$  memiliki nilai t-hitung sebesar 10,75 dengan signifikan sebesar 0,000 artinya PDRB ( $\text{Log } X_1$ ) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Restoran ( $\text{Log } Y$ ), atau dapat dibandingkan dengan t-tabel yaitu sebesar 2,447 jika dibandingkan dengan t-hitung 10,75 maka lebih besar dari t-table sebesar 2,446 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variable  $\text{Log } X_1$  berpengaruh secara signifikan terhadap variable  $\text{Log } Y$ . Artinya peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit sektor ekonomi pemerintah kota bukittinggi diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak restoran. Hal ini sesuai



dengan hipotesa yang telah ditetapkan dalam bab satu bahwa  $\text{Log } X_1$  berpengaruh signifikan terhadap  $\text{Log } Y$ .

## 2. Jumlah Penduduk ( $\text{Log } X_2$ )

Pengujian yang kedua adalah menentukan pengaruh variable Jumlah Penduduk ( $\text{Log } X_2$ ) terhadap Penerimaan Pajak Restoran ( $\text{Log } Y$ ), dapat dilihat pada Tabel diatas. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa  $\text{Log } X_2$  memiliki nilai t-hitung sebesar 3,189 dengan signifikan sebesar 0,019 artinya Jumlah Penduduk ( $\text{Log } X_2$ ) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Restoran ( $\text{Log } Y$ ), atau dapat dibandingkan dengan t-tabel yaitu sebesar 2,447 jika dibandingkan dengan t-hitung 3,189 maka lebih besar dari t-table sebesar 2,447, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variable  $\text{Log } X_2$  berpengaruh secara signifikan secara positif terhadap variable  $\text{Log } Y$ . Hal tersebut disebabkan karena penduduk yang berada di Kota Bukittinggi menggunakan jasa atas pelayanan restoran.

## 3. Jumlah Kunjungan Wisatawan ( $\text{Log } X_3$ )

Pada variable Jumlah Kunjungan Wisatawan ( $\text{Log } X_3$ ), pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak Restoran ( $\text{Log } Y$ ) dapat dilihat pada Tabel diatas. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa  $\text{Log } X_3$  memiliki nilai t-hitung sebesar 2,836 dengan signifikan sebesar 0,030 artinya Jumlah Kunjungan Wisatawan ( $\text{Log } X_3$ ) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Restoran ( $\text{Log } Y$ ), atau dapat dibandingkan dengan t-tabel yaitu sebesar 2,447 jika dibandingkan dengan t-hitung maka 2,836 lebih besar dari t table sebesar 2,447 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variable  $\text{Log } X_3$  berpengaruh secara signifikan terhadap variable  $\text{Log } Y$ .

Dengan mendasarkan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini mendukung hipotesa yang telah ditetapkan dalam bab satu bahwa  $\text{Log } X_3$  berpengaruh signifikan terhadap  $\text{Log } Y$ . Hal ini membuktikan bahwa meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh pada penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi.

### **5.3 Implikasi Kebijakan**

Dari hasil penemuan empiris dan studi-studi yang telah diungkapkan pada bagian-bagian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan yang positif antara variabel independen yaitu : PDRB, jumlah penduduk dan jumlah kunjungan wisatawan dengan variabel dependen yaitu penerimaan pajak restoran. Ini dapat dari nilai koefisien determinasi yang diperoleh sehingga dapat diartikan bahwa variasi perubahan variabel bebas dapat menerangkan variasi perubahan variabel terikat. Penerimaan pajak restoran dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan. Maka untuk lebih meningkatkan lagi penerimaan pajak restoran tersebut dan pertumbuhannya terus meningkat, maka perlu dilakukan berbagai kebijaksanaan.

#### **5.3.1 PDRB**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa pengaruh PDRB sangat besar terhadap penerimaan pajak restoran, dimana apabila kenaikan terhadap PDRB maka akan menaikkan penerimaan pajak restoran. Oleh karena itu prestasi ini harus dipertahankan oleh pemerintah dan akan lebih baik lagi apabila dapat ditingkatkan untuk kedepannya. Kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah adalah berupaya untuk menstabilkan dan berupaya untuk memberikan jalan bagi para pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian. Khususnya pada sektor-

sektor unggulan, seperti sektor jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi, serta sektor perdagangan. Keadaan ekonomi yang baik akan menunjang pertumbuhan pembangunan. Membaiknya keadaan ekonomi secara tidak langsung juga akan dapat meningkatkan penerimaan-penerimaan pajak restoran.

### **5.3.2 Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk memberikan pengaruh yang signifikan secara positif terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi. Dikarenakan penduduk yang ada di Kota Bukittinggi masih menggunakan pelayanan restoran untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ini juga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Maka dari pada itu penerimaan pajak restoran sebagai pajak daerah dan penyumbang terhadap pendapatan daerah masih berpotensi di Bukittinggi. Kinerja yang lebih baik dari pemerintah akan lebih meningkatkan lagi penerimaan pajak tersebut.

### **5.3.3 Kunjungan Pariwisata**

Secara statistik jumlah kunjungan pariwisata di kota Bukittinggi memberikan pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak restoran. Ini dikarenakan jumlah wisatawan mempunyai kontribusi terhadap penerimaan pajak restoran. Pemerintah diharuskan lebih meningkatkan lagi pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung di Kota Bukittinggi. Namun jika tidak ada kemajuan-kemajuan atau inovasi yang dilakukan dalam kepariwisataan di Kota Bukittinggi maka tingkat kepuasan dari wisatawan akan berkurang. Dan itu akan mempengaruhi minat dari wisatawan untuk melakukan kunjungan di Bukittinggi. Pemerintah harus memikirkan lebih lanjut agar sektor pariwisata masih bisa diandalkan dalam kontribusinya terhadap pendapatan daerah, khususnya

penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi. Seperti penyediaan tempat parkir yang lebih terkoordinir dengan baik, memberikan rasa aman dan nyaman terhadap wisatawan yang berkunjung, pelayanan restoran yang baik dan bersih, serta penerapan system transportasi yang lebih baik.





## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi selama periode 2001-2010 ternyata mengalami peningkatan dari tahun ketahun dimana pertumbuhan secara rata-rata sebesar 5,27 persen.
2. Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Bukittinggi selalu meningkat dalam kurun waktu 2001-2010, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9,86 persen per tahunnya.
3. Dari hasil hipotesa hasil t-hitung untuk variable PDRB lebih besar dari t-tabel ( $10,752 > 2,447$ ), dengan tingkat kepercayaan sebesar 97,2% dan  $\alpha$  sebesar 5%. Hal ini menyatakan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara variable PDRB terhadap penerimaan Pajak Restoran di Kota Bukittinggi.
4. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Restoran di Kota Bukittinggi, dimana dari hasil pengujian hipotesa hasil t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $3,189 > 2,447$ ), dengan tingkat kepercayaan sebesar 97,2% ( $0,972$ ) dan  $\alpha$  sebesar 5%.
5. Variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh positif dan signifikan, ditunjukkan oleh pengujian hipotesa hasil nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $2,836 > 2,447$ ) dengan tingkat kepercayaan sebesar 97,2% dan  $\alpha$  sebesar 5%.

6. Dari hasil pengujian F diperoleh F-hitung sebesar 69,249 sedangkan F-tabelnya 4,757. Dimana F-hitung lebih besar dari F-tabel, sehingga secara keseluruhan variabel bebas bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Begitu juga dengan pengujian t, diperoleh bahwa variabel yang mempengaruhi yaitu PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kunjungan Wisatawan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Restoran.

## 6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Oleh karena PDRB memiliki pengaruh yang sangat positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di kota Bukittinggi, maka Pemda Kota Bukittinggi harus mendorong peningkatan PDRB melalui pelayanan public yang optimal.
2. Jumlah penduduk juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Restoran di Bukittinggi, sebaiknya Pemda Bukittinggi harus bisa mengatur jumlah penduduk dan berupaya untuk meningkatkan taraf kehidupan penduduk di kota Bukittinggi. Agar di masa akandatang penerimaan Pajak Restoran bisa terealisasi lebih baik lagi.
3. Karena variable jumlah kunjungan wisatawan mempengaruhi penerimaan pajak restoran di Bukittinggi secara positif dan signifikan, maka Pemda juga perlu mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisata melalui pelayanan yang baik dan maksimal oleh pihak restoran, hotel dan pelayanan public lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. 2000. *Analisis Regresi, Teori, Kasus & Solusi*. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Ananta, Aris (Editor). 1991. *Ekonomi Sumberdaya Manusia, Lembaga Demografi FEUI dan PAU Bidang Ekonomi UI*. Jakarta.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE.
- Astuti, Puji. 2006. *Pengaruh Jumlah Wisatawan, PDRB, Jumlah Penduduk Terhadap Pajak Hotel dan Restoran Di Surakarta*. Surakarta : Kumpulan Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis dengan Program SPSS*. Semarang : UNDIP.
- Gujarati, Damodar. 1995. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga.
- Halim, Abdul, (ed). 2000. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Jhingan, M. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Liliyana, Yunita. 2010. *Evaluasi Penerimaan Pajak Restoran di DKI Jakarta*. Jakarta : FE UI.
- Mudrajat, Kuncoro. 2001. *Metode Kuantitatif:Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Mangkoesebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA.
- Munawir, S. 1992. *Pokok-Pokok Perpajakan*. Yogyakarta : Liberty.
- Mardiasmo. 2004. *Perpajaka*. Yogyakarta : ANDI offset.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 tahun 2004 tentang, *Pajak Restoran*.

- Qadarrahman, Nasrul 2010. *Analisis Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kota Semarang dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Salah, Wahab. 2003. *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Santoso, Singgih. 2002. *SPSS versi 10 Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Soediyono, 1981. *Pengantar Analisa Pendapatan Nasional*. Yogyakarta : Edisi Ke-3 Liberty.
- Spillane, James J. 1987. *Pariwisata Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius.
- Suhendi, Eno, 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Yogyakarta*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Sukirno, Sadono. 2005. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta : Edisi Ke-3, PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang, *Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang, *Perubahan Peraturan Perundang-undangan RI Tahun 2001 tentang Pajak dan Restribusi*.
- Walpole, Ronald E. 1992. *Pengantar Statistik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Pusat Utama.
- Yoeti, Oka A.2008. *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta : Kompas.



### LAMPIRAN 1

#### DATA PAJAK RESTORAN, PDRB, JUMLAH PENDUDUK dan JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN DI KOTA BUKITTINGGI 2001-2010

<b>Tahun</b>	<b>Restoran</b>	<b>PDRB</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Jumlah Kunjungan Wisatawan</b>
2001	579805983	616840,58	93282	134207
2002	647937911	645877,2	94350	148309
2003	720018061	681527,69	98551	164510
2004	796407644	717828,85	100333	173260
2005	971931702	762433,07	101276	183904
2006	1271137611	809613,62	102228	240738
2007	1589640937	862157,54	104278	266814
2008	2016895646	918914,69	106045	293494
2009	2254283486	969590,88	107805	309413
2010	2503937133	1028923,29	111312	329922



ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.922	3	.307	69.249	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.027	6	.004		
	Total	.949	9			

a. Predictors: (Constant), Jumlah Kunjungan Wisata, Jumlah Penduduk, PDRB

b. Dependent Variable: Pajak Restoran

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-17.159	2.043		-8.401	.000		
	PDRB	2.362	.220	.891	10.752	.000	.681	1.469
	Jumlah Penduduk	.339	.106	.234	3.189	.019	.869	1.150
	Jumlah Kunjungan Wisata	.316	.111	.225	2.836	.030	.742	1.348

a. Dependent Variable: Pajak Restoran



## LAMPIRAN 2

### ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Restoran	10	7.79	8.63	8.1987	.32471
PDRB	10	10.42	10.77	10.6270	.12252
Jumlah Penduduk	10	2.97	3.62	3.2290	.22406
Jumlah Kunjungan Wisata	10	3.94	4.75	4.2605	.23135
Valid N (listwise)	10				

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pajak Restoran	PDRB	Jumlah Penduduk	Jumlah Kunjungan Wisata
N		10	10	10	10
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	8.1987	10.6270	3.2290	4.2605
	Std. Deviation	.32471	.12252	.22406	.23135
Most Extreme Differences	Absolute	.234	.172	.161	.187
	Positive	.234	.116	.161	.187
	Negative	-.207	-.172	-.129	-.115
Kolmogorov-Smirnov Z		.742	.545	.509	.592
Asymp. Sig. (2-tailed)		.641	.928	.958	.875

a. Test distribution is Normal.

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.986 <sup>a</sup>	.972	.958	.06663	.972	69.249	3	6	.000	1.465

a. Predictors: (Constant), Jumlah Kunjungan Wisata, Jumlah Penduduk, PDRB

b. Dependent Variable: Pajak Restoran